Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 8 Nomor 11 (2026) 1129 – 1140 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v8i11.13686

Pemberdayaan Perempuan Pesisir dalam Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim: Refleksi Kegiatan Partisipatif di Desa Bontosunggu, Kepulauan Selayar

Ria Renita Abbas[1], Muh. Iqbal Latief[2]
Hari Azhari Rahim[3], Andi Muhammad Arif Haris[4]
[1]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia
riarenita@unhas.ac.id[1]

ABSTRACT

*Coastal areas face risks associated with changing environmental and climatic conditions, while a community's capacity to respond to these risks is shaped by socio-economic conditions, social networks, local knowledge, and institutional frameworks. This article describes the process of empowering coastal women in disaster mitigation and climate change adaptation activities in Bontosunggu Village, Bontoharu District, Selayar Islands Regency. The article employs a qualitative descriptive approach, drawing on narrative reports and photographic documentation of activities that took place on August 20, 2026. The initiative utilized a participatory approach, providing a space for members of the *Community Empowerment Istri Nelayan* (CEIN)—a group for the empowerment of fishers' wives—to share their experiences and knowledge regarding environmental shifts, weather and seasonal patterns, disaster risks, impacts on their families and livelihoods, preparedness, social capital, local wisdom, the roles of women, and institutional structures. The report indicates that these discussions served as a platform for identifying the community's issues, capacities, vulnerabilities, and potential social capital. One notable aspiration expressed by CEIN members was the desire to form a disaster-preparedness group. The article underscores the importance of integrating local knowledge with scientific information and positioning women as key actors in risk governance.*

Keywords : coastal women, disaster mitigation, climate change adaptation, social capital, community participation.

ABSTRAK

Kawasan pesisir menghadapi risiko yang berkaitan dengan perubahan kondisi lingkungan dan iklim, sementara kemampuan masyarakat merespons risiko juga dibentuk oleh kondisi sosial-ekonomi, jejaring sosial, pengetahuan lokal, dan kelembagaan. Artikel ini mendeskripsikan proses pemberdayaan perempuan pesisir dalam kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Artikel disusun dengan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan laporan naratif pelaksanaan dan dokumentasi foto kegiatan yang berlangsung pada 20 Agustus 2026. Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif yang memberi ruang bagi anggota Community Empowerment Istri Nelayan (CEIN) untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang perubahan lingkungan, cuaca dan musim, risiko bencana, dampak terhadap keluarga dan mata pencaharian, kesiapsiagaan, modal sosial, kearifan lokal, peran perempuan, serta kelembagaan. Laporan menunjukkan bahwa diskusi berfungsi sebagai ruang untuk mengidentifikasi isu, kapasitas, kerentanan, dan potensi modal sosial komunitas.

Volume 8 Nomor 11 (2026) 1129 – 1140 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v8i11.13686

Salah satu aspirasi yang tercatat adalah keinginan anggota CEIN untuk membentuk kelompok siaga bencana.. Artikel menegaskan pentingnya menghubungkan pengetahuan lokal dan informasi ilmiah serta menempatkan perempuan sebagai aktor dalam tata kelola risiko.

Kata kunci : *perempuan pesisir, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, modal social, partisipasi komunitas.*

PENDAHULUAN

Perubahan iklim tidak hanya berkaitan dengan perubahan kondisi biofisik, tetapi juga berhubungan dengan cara masyarakat memperoleh penghidupan, mengakses sumber daya, membangun jejaring pertolongan, dan mengorganisasikan respons terhadap risiko. Laporan penilaian *Intergovernmental Panel on Climate Change* menekankan bahwa dampak iklim, kerentanan, dan kapasitas adaptasi saling berkaitan dan berbeda menurut konteks sosial, ekonomi, serta wilayah (IPCC, 2022). Dengan demikian, pembahasan mengenai risiko di kawasan pesisir perlu melampaui penjelasan yang semata-mata menempatkan bencana sebagai peristiwa alam.

Kerentanan terhadap bencana terbentuk melalui hubungan antara ancaman, paparan, sensitivitas, dan kapasitas untuk merespons. Pada masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sumber daya laut dan kondisi cuaca, perubahan musim atau ketidakpastian kondisi laut dapat berpengaruh terhadap kegiatan melaut, pendapatan keluarga, dan keputusan keseharian. Namun, dampak tersebut tidak dialami secara seragam. Akses terhadap informasi, sumber daya ekonomi, dukungan sosial, serta kemampuan berkoordinasi dengan institusi formal dapat membedakan kemampuan rumah tangga dan komunitas untuk menghadapi gangguan.

Dalam konteks Indonesia, Nurhidayah dan McIlgorm (2019) menekankan pentingnya kerangka hukum dan kelembagaan adaptasi pesisir yang mampu memperhatikan masyarakat terdampak dan meningkatkan keterlibatan komunitas. Pada tingkat komunitas, Aldrich dan Meyer (2015) menunjukkan pentingnya modal sosial dan jaringan hubungan dalam ketahanan masyarakat terhadap bencana. Sementara itu, Cutter, Ash, dan Emrich (2014) memperlihatkan bahwa ketahanan komunitas memiliki dimensi kewilayahan dan dibentuk oleh beragam kondisi sosial. Kerangka tersebut menempatkan kapasitas masyarakat, hubungan antaraktor, dan kelembagaan sebagai bagian penting dari pengurangan risiko.

Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, menjadi lokasi program pengabdian yang berangkat dari identifikasi awal mengenai kerentanan kawasan pesisir dan keterbatasan kesiapsiagaan komunitas. Dalam proposal program, masalah prioritas mencakup literasi kebencanaan yang masih perlu diperkuat, belum tersedianya sistem kesiapsiagaan berbasis komunitas yang terstruktur, keterbatasan strategi adaptasi, serta belum optimalnya integrasi kearifan lokal dengan pengetahuan ilmiah. Kondisi lingkungan pesisir, ketidakpastian cuaca dan musim, serta ketergantungan mata pencaharian pada sumber daya alam

Volume 8 Nomor 11 (2026) 1129 – 1140 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v8i11.13686

diposisikan sebagai konteks sosial-ekologis yang penting. Uraian tersebut merupakan latar identifikasi program, bukan hasil pengukuran risiko teknis atau survei rumah tangga.

Program melibatkan *Community Empowerment Istri Nelayan (CEIN)* sebagai mitra utama. Keterlibatan perempuan pesisir relevan karena dampak gangguan terhadap penghidupan nelayan tidak berhenti pada aktivitas melaut, tetapi berhubungan pula dengan pengelolaan ekonomi rumah tangga, pemenuhan kebutuhan keluarga, dan jejaring bantuan sosial. Meski demikian, perempuan tidak dapat secara otomatis diasumsikan memiliki pengaruh yang setara dalam pengambilan keputusan kebencanaan. Pradana, Rohi, dan Patricia (2025), dalam kajian komunitas pesisir di Indonesia, menunjukkan bahwa norma gender, beban pengasuhan, dan relasi kuasa dapat membatasi partisipasi perempuan dalam ruang formal pengurangan risiko bencana. Karena itu, pemberdayaan perlu dipahami sebagai proses membuka ruang partisipasi yang bermakna, bukan sekadar menghadirkan perempuan sebagai peserta kegiatan.

Pendekatan partisipatif menjadi relevan ketika pengalaman masyarakat diakui sebagai salah satu sumber pengetahuan untuk memahami risiko. Mercer, Kelman, Taranis, dan Suchet-Pearson (2010) menjelaskan pentingnya mengembangkan hubungan antara pengetahuan lokal dan pengetahuan ilmiah dalam pengurangan risiko bencana. Integrasi tersebut bukan berarti menggantikan informasi ilmiah dengan pengetahuan lokal ataupun sebaliknya. Pengalaman membaca perubahan lingkungan, pola musim, serta kondisi setempat dapat membantu mengidentifikasi pertanyaan dan prioritas lokal, sementara informasi ilmiah diperlukan untuk memeriksa, melengkapi, dan mengomunikasikan risiko secara bertanggung jawab.

Berdasarkan konteks tersebut, artikel ini bertujuan mendeskripsikan proses kegiatan pemberdayaan perempuan pesisir melalui sosialisasi dan diskusi partisipatif mengenai mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di Desa Bontosunggu. Secara khusus, pembahasan diarahkan pada isu yang tercatat dalam diskusi, makna sosiologis keterlibatan CEIN, peran modal sosial dan pengetahuan lokal, serta kebutuhan tindak lanjut kelembagaan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dan melibatkan CEIN sebagai mitra utama bersama Pemerintah Desa Bontosunggu. Dokumentasi kegiatan menunjukkan sosialisasi berlangsung pada 20 Agustus 2026. Kegiatan merupakan bagian dari program PPMU-PK Universitas Hasanuddin tahun 2026 dengan tema pemberdayaan komunitas pedesaan dalam mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Dalam rancangan program, pendekatan pelaksanaan dinyatakan sebagai pemberdayaan masyarakat partisipatif dengan metode *Participatory Action Research (PAR)*. Prinsip penting PAR mencakup keterlibatan masyarakat, refleksi atas

Volume 8 Nomor 11 (2026) 1129 – 1140 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v8i11.13686

persoalan yang dialami, proses belajar bersama, dan orientasi pada tindakan (Baum, MacDougall, & Smith, 2006). Pada kegiatan yang terdokumentasi, penerapan prinsip partisipatif tampak melalui sosialisasi yang memberi ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman dan melalui diskusi mengenai perubahan lingkungan, risiko, kehidupan keluarga, dan kelembagaan lokal.

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis telaah dokumen pelaksanaan. Sumber yang digunakan adalah laporan naratif kegiatan, tabel isu yang dibahas dalam diskusi, serta foto dokumentasi. Informasi dalam laporan dikelompokkan ke dalam tema-tema yang relevan dengan tujuan program: (1) konteks sosial-ekologis dan risiko; (2) pengalaman keluarga dan mata pencaharian; (3) kesiapsiagaan dan pengetahuan lokal; (4) modal sosial dan peran perempuan; serta (5) kebutuhan kelembagaan. Tema-tema tersebut selanjutnya ditafsirkan dengan menggunakan literatur tentang ketahanan komunitas, modal sosial, integrasi pengetahuan, dan partisipasi perempuan dalam pengurangan risiko bencana.

Foto digunakan untuk mengonfirmasi dan memperlihatkan bentuk kegiatan yang berlangsung, seperti sosialisasi, penyampaian materi, serta kehadiran peserta dalam forum. Foto tidak diperlakukan sebagai bukti tunggal mengenai kualitas partisipasi atau perubahan kapasitas. Laporan naratif menjadi sumber utama untuk menjelaskan proses dan aspirasi yang tercatat.

Batasan ini penting untuk menjaga kesesuaian antara kekuatan data dan kesimpulan. Pernyataan mengenai keinginan membentuk kelompok siaga bencana, misalnya, disajikan sebagai aspirasi yang dilaporkan pada akhir diskusi. Pernyataan itu tidak disamakan dengan pembentukan kelompok yang telah disahkan atau beroperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembukaan dan pembentukan kesepahaman dengan mitra

Kegiatan diawali dengan pembukaan yang dihadiri tim pengabdian, Kepala Desa Bontosunggu Andi Patmawati, aparat pemerintah desa, dan anggota CEIN. Pembukaan menjadi ruang untuk memperkenalkan tujuan program serta membangun kesepahaman antara tim pelaksana, pemerintah desa, dan komunitas mitra mengenai pentingnya mitigasi bencana, kesiapsiagaan berbasis komunitas, dan adaptasi perubahan iklim.

Kehadiran pemerintah desa dan CEIN memperlihatkan bahwa kegiatan tidak diposisikan sebagai interaksi antara tim perguruan tinggi dan individu peserta semata. Sejak awal, kegiatan diarahkan untuk menghubungkan aktor komunitas dengan otoritas desa. Hubungan tersebut penting karena kesiapsiagaan membutuhkan kombinasi pengetahuan lokal, komunikasi risiko, akses sumber daya, serta koordinasi saat kondisi darurat.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Volume 8 Nomor 11 (2026) 1129 – 1140 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v8i11.13686



Gambar 1. Sosialisasi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di Desa Bontosunggu, 20 Agustus 2026.
Sumber: dokumentasi kegiatan.

Sosialisasi sebagai pembelajaran dua arah

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim. Materi diarahkan untuk menghubungkan perubahan iklim dan kondisi lingkungan pesisir dengan risiko bencana serta kerentanan sosial-ekonomi masyarakat. Sosialisasi juga merespons empat masalah yang diidentifikasi dalam rancangan program: literasi kebencanaan yang perlu diperkuat, kesiapsiagaan komunitas yang belum terstruktur, keterbatasan strategi adaptasi, dan integrasi kearifan lokal yang belum optimal.

Menurut laporan, sosialisasi tidak hanya berlangsung sebagai penyampaian materi dari tim kepada peserta. Anggota CEIN diberi ruang menyampaikan pengalaman, pengetahuan, dan kondisi keseharian sebagai masyarakat pesisir. Pola dua arah ini memiliki arti penting bagi pemberdayaan karena pengalaman warga dapat memperjelas bentuk persoalan yang dianggap mendesak, cara risiko dipahami, dan sumber daya yang tersedia di lingkungan sosial setempat. Proses tersebut memperlihatkan upaya menggeser posisi masyarakat dari penerima informasi menjadi pihak yang ikut membingkai masalah.

Isu yang terangkat dalam diskusi partisipatif

Laporan mencatat sepuluh isu diskusi yang berhubungan dengan perubahan lingkungan, pengalaman risiko, penghidupan, sumber daya sosial, dan kelembagaan. Agar keterkaitan antartema lebih mudah dibaca, sepuluh isu tersebut dikelompokkan dalam Tabel 1 ke dalam lima dimensi analitis. Pengelompokan ini merupakan sintesis penulis berdasarkan tabel diskusi dalam laporan, bukan hasil pengukuran tingkat risiko atau frekuensi jawaban peserta.

Volume 8 Nomor 11 (2026) 1129 – 1140 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v8i11.13686

Tabel 1. Pengelompokan isu diskusi berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan.

Dimensi analitis	Isu yang tercatat dalam laporan	Fokus yang dibahas
Kondisi sosial-ekologis	Perubahan kondisi lingkungan; perubahan cuaca dan musim	Perubahan kondisi pesisir serta pola cuaca yang dirasakan masyarakat.
Risiko dan dampak rumah tangga	Risiko bencana; dampak terhadap keluarga	Ancaman yang dianggap penting serta dampaknya terhadap aktivitas dan kehidupan rumah tangga.
Penghidupan dan kesiapsiagaan	Mata pencaharian; kesiapsiagaan	Hubungan kondisi lingkungan dengan ekonomi keluarga serta pengetahuan dan praktik ketika menghadapi bencana.
Sumber daya sosial-budaya	Modal sosial; kearifan lokal	Gotong royong, solidaritas, jejaring masyarakat, dan pengetahuan membaca tanda-tanda alam.
Aktor dan kelembagaan	Peran perempuan; kelembagaan	Peran istri nelayan dalam situasi krisis serta peran CEIN dan pemerintah desa dalam kesiapsiagaan.

Sumber: diolah dari laporan kegiatan.

Pengelompokan tersebut memperlihatkan bahwa diskusi tidak hanya diarahkan pada jenis ancaman bencana. Pembahasan juga menyentuh dimensi sosial yang menghubungkan kondisi lingkungan dengan keseharian rumah tangga: mata pencaharian, pengambilan keputusan ketika menghadapi kondisi krisis, hubungan antarwarga, pengetahuan lokal, dan fungsi kelembagaan. Cakupan isu tersebut sejalan dengan pandangan bahwa ketahanan komunitas tidak cukup dijelaskan melalui keberadaan prasarana fisik, melainkan juga bergantung pada kapasitas sosial dan hubungan antarpelaku (Aldrich & Meyer, 2015; Cutter et al., 2014).

Meski demikian, laporan yang tersedia lebih berfungsi sebagai dokumentasi atas tema-tema yang muncul serta simpulan umum hasil diskusi. Informasi pada tabel perlu dibaca secara hati-hati dan tidak dimaksudkan untuk menarik kesimpulan mengenai tingkat dominasi suatu risiko tertentu, keseragaman pengalaman antarpartisipan, maupun tingkat konsistensi penerapan praktik kesiapsiagaan dalam

Volume 8 Nomor 11 (2026) 1129 – 1140 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v8i11.13686

kehidupan sehari-hari. Dengan demkikian, kontribusi utama data terletak pada kemampuannya memetakan spektrum isu yang dianggap relevan oleh peserta serta menyediakan pijakan awal untuk eksplorasi dan pendalaman yang lebih komprehensif pada tahap penelitian berikutnya.



Gambar 2. Forum sosialisasi dan diskusi bersama peserta kegiatan. Sumber: dokumentasi kegiatan.

Aspirasi penguatan kelembagaan kesiapsiagaan

Salah satu hal yang secara eksplisit disebutkan dalam laporan adalah munculnya keinginan anggota CEIN untuk membentuk kelompok siaga bencana sebagai bagian dari penguatan kelembagaan. Aspirasi ini menjadi temuan penting karena menunjukkan bahwa pembahasan tentang risiko juga mengarah pada pertanyaan mengenai siapa yang akan mengoordinasikan kesiapsiagaan pada tingkat lokal. Keinginan tersebut memberi indikasi mengenai kebutuhan akan wadah yang dapat menautkan informasi, pembagian peran, komunikasi, serta kerja sama dengan pemerintah desa.

Selain kelompok siaga bencana, laporan juga menempatkan CEIN sebagai mitra yang membantu menyiapkan peserta dan diproyeksikan menjadi agen perubahan untuk menyebarluaskan pengetahuan kepada keluarga serta masyarakat sekitar.

PEMBAHASAN

Kerentanan bencana sebagai persoalan sosial-ekologis

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa isu lingkungan dan cuaca dibicarakan bersama dengan mata pencaharian, kehidupan keluarga, dan kesiapsiagaan. Hubungan ini penting secara sosiologis karena memperlihatkan bahwa risiko lingkungan hadir melalui struktur kehidupan sehari-hari. Ketergantungan pada sumber daya pesisir, posisi ekonomi rumah tangga, akses terhadap informasi, dan kemampuan berkoordinasi dengan aktor lain dapat memengaruhi pilihan yang dimiliki warga ketika berhadapan dengan kondisi yang tidak pasti.

Volume 8 Nomor 11 (2026) 1129 – 1140 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v8i11.13686

Cutter et al. (2014) mengingatkan bahwa ketahanan komunitas bersifat kontekstual dan tersebar tidak merata. Dalam program ini, diskusi mengenai keluarga dan mata pencaharian memberi dasar untuk memperlakukan mitigasi bencana sebagai urusan sosial selain teknis. Informasi mengenai ancaman perlu dihubungkan dengan siapa yang dapat menerima peringatan, bagaimana keputusan keluarga dibuat, sumber daya apa yang dapat digunakan, bagaimana dukungan sosial diakses, dan bagaimana kelompok rentan dilibatkan.

Dari sudut adaptasi perubahan iklim, diskusi tentang pola cuaca dan mata pencaharian juga dapat menjadi awal untuk membahas strategi adaptasi rumah tangga. Nurhidayah dan McIlgorm (2019) menekankan arti kerangka kebijakan dan kelembagaan yang memungkinkan keterlibatan komunitas pesisir. Pada tingkat desa, hal ini berarti kebutuhan lokal tidak hanya dicatat selama pertemuan, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam pilihan tindakan, penanggung jawab, sumber daya, dan koordinasi dengan pemerintah desa atau instansi terkait.

Perempuan pesisir: dari partisipan menuju aktor dalam tata kelola risiko

Pemilihan CEIN sebagai mitra utama menempatkan perempuan pesisir dalam posisi penting pada kegiatan penguatan kesiapsiagaan. Dalam perspektif sosiologi gender, perhatian terhadap perempuan bukan berarti menganggap semua perempuan mempunyai pengalaman yang sama atau secara alamiah lebih siap menghadapi bencana. Sebaliknya, penting untuk melihat pekerjaan perawatan, pengelolaan keuangan rumah tangga, jejaring bantuan, dan akses perempuan terhadap informasi serta proses pengambilan keputusan sebagai bagian dari konteks sosial yang membentuk respons keluarga terhadap krisis.

Pradana et al. (2025) memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengurangan risiko bencana dapat dipengaruhi oleh norma gender, beban pengasuhan, dan relasi kuasa kelembagaan. Kerangka tersebut membantu menghindari dua penyederhanaan: perempuan tidak tepat diposisikan hanya sebagai kelompok rentan yang perlu dilindungi, tetapi juga tidak tepat langsung disebut sebagai agen perubahan efektif tanpa melihat ruang pengambilan keputusan dan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks kegiatan Bontosunggu, laporan menyebutkan posisi CEIN sebagai mitra, partisipasi dalam diskusi, dan aspirasi pembentukan kelompok siaga bencana. Informasi ini mendukung pembacaan tentang peluang peran kolektif perempuan, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa otoritas perempuan dalam tata kelola bencana telah meningkat.

Agar pemberdayaan bergerak dari kehadiran menuju pengaruh, tindak lanjut sebaiknya memberi CEIN ruang dalam menentukan prioritas, menyusun pembagian tugas, memeriksa rencana kesiapsiagaan, mengidentifikasi kebutuhan kelompok rentan, dan berkoordinasi dengan pemerintah desa. Wadah partisipasi perlu mempertimbangkan waktu kegiatan, akses informasi, tanggung jawab pengasuhan, dan kesempatan perempuan berbicara serta mengambil keputusan. Dengan cara ini,

Volume 8 Nomor 11 (2026) 1129 – 1140 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v8i11.13686

peran sebagai *local change agents* dapat dinilai berdasarkan aktivitas dan pengaruh yang dapat didokumentasikan, bukan hanya berdasarkan harapan program.

Modal sosial dan pengetahuan lokal sebagai sumber daya komunitas

Diskusi yang tercatat mencakup gotong royong, solidaritas, jejaring masyarakat, dan pengetahuan dalam membaca tanda-tanda alam. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya sosial dan pengetahuan lokal telah diakui sebagai tema penting dalam pembicaraan mengenai kesiapsiagaan. Aldrich dan Meyer (2015) menyoroti pentingnya jaringan sosial dalam ketahanan dan pemulihan komunitas. Relasi sosial dapat mendukung pertukaran informasi, bantuan timbal balik, dan mobilisasi sumber daya saat terjadi gangguan. Namun, keberadaan nilai gotong royong tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa mekanisme bantuan berjalan efektif saat bencana; bentuk, jangkauan, dan keterbatasan jejaring tersebut tetap perlu diperiksa.

Pengetahuan lokal juga dapat membantu warga merumuskan perubahan yang dirasakan dari waktu ke waktu, termasuk perubahan cuaca, lingkungan, dan kondisi pesisir. Mercer et al. (2010) menekankan pentingnya mempertemukan pengetahuan lokal dengan pengetahuan ilmiah untuk pengurangan risiko. Dalam pelaksanaan lanjutan, pengalaman warga dapat didokumentasikan dan diperiksa bersama informasi dari sumber resmi, misalnya prakiraan cuaca, peringatan dini, atau peta bahaya yang relevan. Proses tersebut dapat mengurangi risiko dua arah: mengabaikan pengalaman setempat atau sebaliknya menempatkan tanda alam lokal sebagai pengganti informasi ilmiah.

Secara praktis, integrasi dua basis pengetahuan membutuhkan prosedur yang konkret. Pertama, warga mengidentifikasi pengalaman dan tanda lingkungan yang dianggap relevan. Kedua, fasilitator membantu membedakan pengamatan, interpretasi, dan perkiraan. Ketiga, informasi tersebut dibandingkan dengan sumber teknis yang dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, hasil pembahasan diubah menjadi keputusan kesiapsiagaan yang mudah dipahami, termasuk siapa yang memantau informasi, bagaimana informasi dibagikan, dan tindakan apa yang dilakukan pada kondisi tertentu.

Dari ruang diskusi menuju kelembagaan dan tindakan berkelanjutan

Aspirasi anggota CEIN (*Community Empowerment Istri Nelayan*) untuk membentuk kelompok siaga bencana merupakan titik awal yang strategis dalam membangun sistem kesiapsiagaan berbasis komunitas di Desa Bontosunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Aspirasi ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat, khususnya perempuan dalam keluarga nelayan, mengenai pentingnya kesiapan menghadapi risiko bencana dan dampak perubahan iklim. Namun, kesadaran yang tumbuh melalui ruang diskusi perlu ditindaklanjuti melalui pengorganisasian yang lebih terstruktur agar tidak berhenti sebagai gagasan atau

Volume 8 Nomor 11 (2026) 1129 – 1140 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v8i11.13686

komitmen individual, melainkan berkembang menjadi tindakan kolektif yang berkelanjutan.

Dalam perspektif sosiologi pedesaan, pembentukan kelembagaan lokal merupakan bagian penting dari proses pemberdayaan masyarakat karena memungkinkan individu mengonsolidasikan pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang dimiliki untuk menghadapi persoalan bersama. Kelompok siaga bencana dapat menjadi ruang bagi anggota CEIN untuk mengembangkan mekanisme kerja kolektif, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kemampuan dalam mengenali risiko, menyebarluaskan informasi peringatan dini, dan mengoordinasikan tindakan kesiapsiagaan di tingkat keluarga maupun komunitas. Dalam konteks ini, pengalaman istri nelayan dalam mengelola rumah tangga, menghadapi ketidakpastian pendapatan, dan membangun jejaring sosial dapat menjadi modal sosial yang mendukung penguatan ketahanan masyarakat pesisir.

Meskipun demikian, pembentukan kelompok siaga bencana tidak cukup hanya melalui penetapan struktur kepengurusan atau pembentukan kelompok secara formal. Kelembagaan tersebut perlu didukung oleh pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, mekanisme komunikasi yang efektif, peningkatan kapasitas anggota, serta prosedur koordinasi ketika menghadapi situasi darurat. Selain itu, diperlukan dukungan sumber daya, akses terhadap informasi cuaca dan peringatan dini dari lembaga berwenang, serta hubungan kerja yang jelas dengan Pemerintah Desa Bontosunggu dan instansi terkait, termasuk BPBD. Dukungan tersebut penting agar kelompok memiliki legitimasi sosial dan kapasitas operasional untuk menjalankan fungsinya secara nyata.

Keberlanjutan kelembagaan juga perlu dibangun melalui integrasi kegiatan kelompok siaga bencana ke dalam agenda pemberdayaan CEIN dan perencanaan pembangunan desa. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan rencana kerja sederhana, pertemuan berkala, pembaruan informasi mengenai risiko bencana dan perubahan iklim, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Melalui proses tersebut, aspirasi anggota CEIN diharapkan berkembang menjadi kelembagaan lokal yang memiliki kemampuan untuk mengorganisasi pengetahuan, memperkuat partisipasi perempuan, dan mendorong tindakan kolektif dalam pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, keberhasilan program tidak semata-mata diukur dari terbentuknya kelompok siaga bencana, tetapi dari kemampuannya menjalankan fungsi secara konsisten, membangun koordinasi dengan pemangku kepentingan, dan mempertahankan praktik kesiapsiagaan sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat Desa Bontosunggu.

KESIMPULAN

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Bontosunggu pada 20 Agustus 2026 memperlihatkan penggunaan forum sosialisasi dan diskusi partisipatif untuk membahas mitigasi bencana serta adaptasi perubahan iklim bersama anggota CEIN dan unsur pemerintah desa. Berdasarkan laporan naratif, diskusi mencakup kondisi

Volume 8 Nomor 11 (2026) 1129 – 1140 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v8i11.13686

lingkungan, cuaca dan musim, risiko bencana, dampak terhadap keluarga, mata pencaharian, kesiapsiagaan, modal sosial, kearifan lokal, peran perempuan, dan kelembagaan. Ruang tersebut berfungsi sebagai proses awal untuk membuka pertukaran pengalaman dan mengenali isu sosial-ekologis yang perlu ditangani.

Secara sosiologis, kegiatan menegaskan perlunya memahami kesiapsiagaan sebagai persoalan yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, jaringan sosial, distribusi peran gender, pengetahuan lokal, dan kapasitas kelembagaan. CEIN memiliki potensi menjadi penggerak pengetahuan pada tingkat keluarga dan komunitas, sementara aspirasi anggota untuk membentuk kelompok siaga bencana menunjukkan adanya kebutuhan untuk menata koordinasi secara lebih terstruktur.

Rekomendasi utama adalah melanjutkan proses partisipatif ke tahap yang dapat didokumentasikan secara lebih kuat: (1) memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok siaga bencana melalui kesepakatan, struktur peran, dan koordinasi dengan pemerintah desa; (2) menghubungkan kearifan lokal dengan informasi ilmiah dan sistem peringatan resmi; (3) memberi ruang kepemimpinan yang bermakna kepada perempuan, termasuk memperhatikan beban waktu dan hambatan partisipasi. Dengan tindak lanjut tersebut, kegiatan awal dapat dikembangkan menjadi proses penguatan ketahanan sosial komunitas yang lebih terarah dan dapat dievaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

Aldrich, D. P., & Meyer, M. A. (2015). Social capital and community resilience. American Behavioral Scientist, 59(2), 254–269. https://doi.org/10.1177/0002764214550299

Baum, F., MacDougall, C., & Smith, D. (2006). Participatory action research. Journal of Epidemiology and Community Health, 60(10), 854–857. https://doi.org/10.1136/jech.2004.028662

Cutter, S. L., Ash, K. D., & Emrich, C. T. (2014). The geographies of community disaster resilience. Global Environmental Change, 29, 65–77. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.08.005

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009325844

Mercer, J., Kelman, I., Taranis, L., & Suchet-Pearson, S. (2010). Framework for integrating indigenous and scientific knowledge for disaster risk reduction. Disasters, 34(1), 214–239. https://doi.org/10.1111/j.1467-7717.2009.01126.x

Nurhidayah, L., & McIlgorm, A. (2019). Coastal adaptation laws and the social justice of policies to address sea level rise: An Indonesian insight. Ocean & Coastal Management, 171, 11–18. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.01.011

Volume 8 Nomor 11 (2026) 1129 – 1140 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v8i11.13686

Pradana, I. P. Y. B., Rohi, R., & Patricia, A. C. (2025). When resilience excludes: Gendered power, intersectionality, and community-based disaster risk reduction in coastal Indonesia. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik), 29(2). https://doi.org/10.22146/jkap.107637